||Volume||4||Issue||1||Juni||2023||

p-ISSN: 2302-6375 e-ISSN: 2775-2194

pp. 271-277

# PERAN DAN FUNGSI BUMDES DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA KERATO KECAMATAN UNTER IWES

Muslim<sup>1</sup>, Lastriani<sup>2\*</sup>, Donny Wijaya<sup>3</sup>

123</sup>Universitas Samawa, Sumbawa Besar
Penulis Korespondensi: lastriani4@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History	Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga ekonomi ditingkat desa yang
Received: 01 June 2023	bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa melalui unit-unit usahanya
Revised: 14 June 2023	serta memanfaatkan berbagai potensi yang ada di Desa. BUMDes Desa Kerato telah dibetuk sejak 2017, namun keadaan BUMDes saat ini tidak berjalan atau
Published: 30 June 2023	dapat dikatakan mati suri. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran
Keywords Peran; Pertumbuhan; Masyarakat; BUMDes;	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes, faktor-faktor yang menghambat BUMDes berjalan secara optimal, serta starategi optimalisasi peran BUMDes di Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data antara lain: observasi dan wawancara. Sumber data penelitian ini di dapatkan melalui informan, dokumen, dan peristiwa. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran untuk membantu masyarakat serta mensejahterakan masyarakat desa melalui unit-unit usaha yang dimilik BUMDes. Secara umum peran ini telah dijalankan oleh BUMDes Kerato namun belum memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Keberadaan BUMDes di Desa Kerato dirasa belum dapat membantu masayarakat secara menyeluruh. Dalam pelaksanaannya masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Faktor yang menjadi penghambat optimalnya kinerja BUMDes

## **PENDAHULUAN**

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Kehadiran BUMDes diharapakan dapat mendorong peningkatan perekonomian masyarakat. Program BUMDes diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam penanganan kesejahtaraan masyarakat desa, karena masyarakat desa dapat diedukasi menjadi mandiri dalam manajemen pengelolaan potensi desa yang sudah dihasilkan.

dengan Lembaga-lembaga De voting.

berasal segi kelembagaan, Segi pelayanan, segi manajemen keuangan. Stategi optimalisasi peran BUMDes adalah dengan melakukan musyawarah dengan Pemerintah Desa dan Lembagalembaga yang ada di desa. Serta bekerja sama

Pengelolaan BUMDes yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian dengan memberdayakan masyarakat. Kehadiran BUMDes sebagai salah satu instrumen untuk menuju desa yang mandiri sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tujuan dari BUMDes adalah meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa. Hal tersebut membuka peluang desa untuk otonomi dalam

e-ISSN: 2775-2194 pp. 271-277

pengelolaan baik kepemerintahan maupun sumber daya ekonominya. Peran BUMDes terlihat pada sumber dana untuk peningkatan pendapatan, kebutuhan masyarakat yang harus dirasakan oleh masyarakat keseluruhan.

BUMDes merupakan elemen dan instrumen penggerak ekonomi masyarakat desa. BUMDes harus dipahami dan dilakukan secara maksimal. BUMDes menjadi pusat perekonomian masyarakat desa untuk menumbuhkembangkan ekonomi lokal (Eko, 2015(Chikamawati, 2019:106). BUMDes menjadi hak desa untuk memanfaatkan aturan UU Desa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Namun penting disadari bahwa BUMDes didirikan atas prakrsa masyarakat didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumber daya lokal.

Badan Usaha Milik Desa mulai ada di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2007 dengan alokasi bantuan pendanaan dari Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka program Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa dan juga program-program lainnya, namun dikarenakan kurangnya koordinasi dan pengawasan serta pembinaan secara aktif dan berkelanjutan, sehingga Badan Usaha Milik Desa tersebut mati suri dan tidak jelas keberadaannya baik kepengurusan maupun pendanaannya.

Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes merupakan salah satu desa yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pada umumnya BUMDes Desa Kerato bergerak pada bidang usaha simpan pinjam, namun saat ini BUMDes tersebut tidak berjalan dengan optimal bahkan dapat dikatakan mati suri. Hal ini disebabkan kurang baiknya manajemen kepengurusannya, dimana anggota-anggota badan pengurus BUMDes jarang berada di tempat sehingga jalannya BUMDes ini menjadi tidak jelas. Hal lain yang menjadi penyebab kurang optimalnya BUMDes ini adalah kurangnya partisipasi baik dari masyarakat, dimana adanya oknum-oknum masyarakat yang tidak tertib dalam pengembalian dana BUMDes yang telah dipinjam meski telah mencapai batas waktu pengembalian. Sehingga menyebabkan dana tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk mengembangkan jenis usaha lain di dalam BUMDes.

Penentuan jenis usaha yang dikelola BUMDes harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi desa yang ada. BUMDes memang dinilai dapat membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, namun belum dapat berjalan dengan maksimal dikarenakan kurangnya manajemen pengelolaan oleh pengurus BUMDes. Hal ini tidak tidak hanya disebabkan oleh internal BUMDes saja, namun disebabkan oleh masyarakat juga.

Berdasarkan berbagai kondisi di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana optimalisasi peran BUMDes. Dengan demikian penelitian ini mengangkat judul: "Peran dan Fungsi BUMDes dalam Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat di Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes".

||Volume||4||Issue||1||Juni||2023|| p-ISSN: 2302-6375

> e-ISSN: 2775-2194 pp. 271-277

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu bentuk penelitian dengan berdasarkan informasi yang berupa kata-kata dari responden yang kemudian dianalisis menjadi sebuah informasi yang bermakna dan memiliki arti (Chalia, 2015). Sebagai penelitian deskriptif, penelitian ini berisikan deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual, akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Dimana dalam pengumpulan datanya peneliti menggunakan teknik pengumpulan data antara lain: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian jenis ini adalah penelitian yang melukiskan fakta atau karakteristik mengenai masalah penelitian yang diteliti dan mengumpulkan data guna melukiskan fakta atau karakteristik mengenai masalah yang diteliti dengan mengumpulkan informasi guna mendeskripsikan gejala-gejala atau fenomena yang ada. Penelitian ini berlokasi atau mengambil lokus di Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sumber data dalam penelitian ini didapat dari data primer dan sekunder, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan; Kepala Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes, Ketua BPD Desa Kerato, Ketua Badan pengurus BUMDes Desa Kerato, Bendahara BUMDes Desa Kerato, Masyarakat Desa Kerato. Hal tersebut dengan pertimbangan untuk mendapatkan informasi serta data yang valid dan akurat berkaitan dengan objek penelitian. Analisa Data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dandapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Proses analisa data dimulai dengan menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder. Pemeriksaan keabsahan data untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan, peneliti akan mengunakan teknik Trigulasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang modalnya berasal dari desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya yang digunakan untuk kesejateraan rakyat (UU No 6 Thn. 2014). BUMDes sebagai badan usaha desa sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDes dibentuk dengan tujuan untuk membantu masyarakat dan berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan secara umum memang benar bahwa keberadaan BUMDes dapat membantu masyarakat, hal ini juga diperkuat oleh pernyataan salah satu masyarakat yang pernah menggunakan jasa simpan pinjam BUMDes Sopo Ate, Bapak Syahril menyatakan sebagai berikut: "Kalau petani seperti saya kan biasanya minjam saat mau tanam jagung. Masa-masa seperti itu kan kita lagi perluperlunya uang. Kalau saya biasanya minjamnya itu musiman, jadi kita kembalikan pinjaman itu setelah panen".

Pernyataan ini juga diperkuat oleh pernyataan Ibu Mini, sebagai berikut: "kita ambil dana itu biasanya pas menghadapi masa tanam gitu. Kalau untuk petani memang sangat terbantu dengan adanya BUMDes gitu". Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Saudari Sulbiati

||Volume||4||Issue||1||Juni||2023||

p-ISSN: 2302-6375 e-ISSN: 2775-2194

pp. 271-277

selaku Bendahara BUMDes sebagai berikut: "Bisa membantu sebenarnya kalau menurut saya yah, bisa membantu kalau untuk petani-petani miskin. Karena BUMDes ini juga kan ada untuk kenyamanan dan kebaikan masyarakat".

BUMDes juga dibentuk dengan harapan dapat memberdayakan masyarakat dalam hal ekonomi. Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Desa Kerato Bapak Muhammad Idham sebagai berikut: "BUMDes ini kan dibentuk dengan tujuan membantu masyarakat agar berdaya yah, kan memang itu tujuan awal diberikan dana. Ya untuk membantu masyarakat".

Pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan Bapak Abdul Haris selaku Direktur BUMDes, beliau menyatakan, "untuk tujuan dibentuk yah untuk membantu masyarakat, terutama petani miskin".

Keberadaan BUMDes memiliki peran untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui unit usaha serta program-program kerjanya. Namun pada pelaksanaannya masih banyak hal yang perlu diperbaiki. BUMDes belum dapat berjalan secara optimal sehingga BUMDes tidak dapat berkembang. hal ini juga diperkuat dengan hasil observasi penulis di lapangan, dimana BUMDes hanya memiliki 1 (satu) unit usaha saja sejak awal terbentuk.

Berbicara tentang BUMDes adalah bicara tentang bagaimana BUMDes dapat membantu masyarakat melalui penciptaan ekonomi kreatif, membantu menaikkan Pendapatan Desa dan masyarakat serta mempekerjaan orang lain di dalam badan BUMDes. Namun pada pelaksanaannya BUMDes "Sopo Ate" Desa Kerato belum mampu berkembang dan hanya memiliki 1 unit usaha saja yaitu simpan pinjam. Sehingga dampat dari kehadiran BUMDes di Desa Kerato tidak memiliki dampak yang signifikan terhadapat pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Kerato.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis penyimpulkan bahwa kebedaraan BUMDes di Desa Kerato memilik peran sebagai berikut:

- a) Untuk Membantu dan Mensejahterakan Masyarakat BUMDes awalnya dibentuk dengan tujuan agar dapat membantu masyarakat. Dengan keadaan masyarakat yang sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani keberadaan BUMDes dengan unit usahanya yang saat ini dirasa memang dapat membantu mereka yang memerlukan dana saat menghadapi masa-masa tanam. Berdasarkan hasil observasi dilapangan ternyata hal ini juga dapat membantu masyarakat umum yang membutuhkan dana mendadak.
- b) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Terkait hal ini, baik pihak BUMDes ataupun Pemerintah Desa tidak pernah melakukan survey langsung untuk mengetahui dampah kehadiran BUMDes. Namun berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan meski keberadaannya dapat membantu masyarakat dengan memberikan dana pinjaman, tapi keberadaan BUMDes saat ini belum dapat memiliki dampak yang begitu signifikan terhadap perekonomian masyarakat di Desa Kerato. Unit usaha BUMDes saat ini hanya berputar pada kegiatan meminjam dan mengembalikan pinjaman.

||Volume||4||Issue||1||Juni||2023|| p-ISSN: 2302-6375

> e-ISSN: 2775-2194 pp. 271-277

## **Faktor-faktor Penghambat**

- a) Dari segi kelembagaan, secara kelembagaan sendiri saat ini BUMDes Desa Kerato dapat dikatakan rusak dikarenakan struktur organisasinya yang tidak lengkap. Sebuah organisasi akan dapat berjalan dengan baik jika semua posisi atau kedudukan dalam organisai tersebut terisi sehingga jalannya organsiasi tidak pincang. Ditambah sumber daya manusia yang saat ini mengelola BUMDes tidak fokus pada pengembangan dan pengelolaan BUMDes dikarenakan memiliki pekerjaan lain di luar BUMDes.
- b) Pelayanan yang tidak optimal Hal ini terlihat dari kurang aktifnya pengurus dan keadaan kantor yang jarang dibuka. Selain itu pengurus juga cukup sulit dihubungi sehingga menghambat masyarakat dalam proses pengembalian pinjaman. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan BUMDes tidak optimal.
- c) Manajemen keuangan yang kurang rapi, terlihat dari adanya kasus masyarakat yang melakukan pinjaman atas nama atau identitas orang lain. BUMDes perlu melakukan pengecekan terhadap setiap masyarakat guna menghindari hal serupa terjadi kembali.
- d) Tidak adanya sistem pengambilan agunan.
- e) Pemberian sanksi yang tidak konsisten, sanksi baru akan diberikan kepada masyarakat yang telah menunggak selama bertahun-tahun. Namun jika telat membayar belum memakan waktu bertahun-tahun makan tidak akan dikenakan sanksi atau penalti apapun.

## Strategi Optimalisasi Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Desa Kerato Kec. Unter Iwes

Agar optimalisasi BUMDes dapat dilaksanakan dengan optimal maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dialami oleh BUMDes. Perlu dilakukannya musyawarah yang dihadiri oleh pihak BUMDes dan Pemerintah Desa beserta Lembagalembaga lain yang ada di desa sampai ke unit terkecil seperti Kadus, RT dan RW. Musyawarah dilakukan dengan tujuan mendiskusikan langkahlangkah yang harus diambil guna mengotimalkan peran keberadaan BUMDes di masyarakat. Musyawarah juga dapat menjadi wadah bagi BUMDes untuk menjelaskan hal-hal yang menjadi hambatan dalam pengelolaan BUMDes. Hal ini didukung oleh pernyataan BPD Desa Kerato Bapak Syahputra Akbar sebagai berikut: "kami berharapkan diadakan musyawarah gitu kan dengan BUMDes dengan Pemerintah Desa dan libatkan kami (Lembaga Desa) agar kami juga bisa bantu apa-apa problemnya gitu".

Selanjutnya adalah membangun komunikasi antara Pengelola BUMDes dengan Pemerintah Desa. Perlu adanya kerjasama antara lembaga-lembaga desa seperti BUMDes

p-ISSN: 2302-6375 e-ISSN: 2775-2194

http://e-journallppmunsa.ac.id/index.php/ksap

IRNAL KAPITA SELEKTA ADMINISTRASI PUBLIK

pp. 271-277

dengan Pemerintah Desa demi kelancaran berjalannya lembaga tersebut. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Kepala Desa Kerato sebagai berikut: "kami kan sudah mengirimkan dia (Direktur BUMDes) surat panggilan yah, kami harap mereka datang ke kantor, beri tahu kami apa saja masalah yang hadapi agar desa bisa bantu". Hal yang sama juga disampaikan oleh Kadus Sering Ai Beta sebagai berikut: "masalahnya kan tidak pernah ada komunikasi dengan kami walaupun sudah kami hubungi. Kami berharap BUMDes itu komunikasika apa-apa masalahnya. Kalau misalkan masalahnya adalah masyarakat yang nunggak maka beri kami daftar namanya gitu, biar kami bantu tagih, bagi tugas lah dengan aparat desa gitu".

BUMDes juga dapat menjalin mitra dengan lembaga-lembaga desa lainnya agar BUMDes dapat berkembang dan dapat dirasakan dampat ekonominya dimasyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh BPD Desa Kerato, sebagai berikut: "kami siap bermitra dengan BUMDes gitu supaya BUMDes bisa berkembang. Dari dulu kan BUMDes ini hanya punya 1 jenis usaha saja, sudah berapa tahun hanya simpan pinjam saja gitu. Kami sudah pernah usulkan beberapa ide usaha tapi sampai saat ini belum ada respon gitu kan dari BUMDes nya".

Pengembangan BUMDes sangat penting bagi masyarakat, karena dengan unit usaha yang berfokus pada pengembangan potensi desa dan masyarakat, keberadaan BUMDes akan dapat dirasakan oleh seluruh golongan masyarat dan tidak terfokus pada satu golongan profesi saja.

Untuk mengoptimalkan peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat perlu dilakukan beberapa hal, yaitu (1) Salah satunya adalah membangun komunikasi dengan Pemerintah Desa serta Lembaga-lembaga lainnya di desa hingga ke unsur terkecil seperti Kadus, RT dan RW. (2) Diadakannya musyawarah dengan tokoh-tokoh desa tersebut guna mengidentifikasi masalah-masalah atau hambatan-hambatan yang dialami oleh BUMDes sehingga dapat ditemukan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. (3) BUMDes juga dapat menjalin kerjasama dengan Lembaga-lembaga yang ada di desa agar BUMDes agar unit usaha yang dimiliki BUMDes dapat berkembang dan membentuk unit usaha baru agar dampak dari kehadiran BUMDes dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Sumber daya manusia adalah potensi paling utama dalam sebuah organisai. Sebuah organisasi akan dapat berkembang jika dikelola oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki anggota yang lengkap untuk mengisi semua posisi dalam organisasi tersebut. Maka dari iru perlu adanya peningkatan jumlah personil dalam kepengurusan BUMDes. Orang-orang yang mengelola BUMDes juga diharapkan dapat berfokus pada pengelolaan dan pengembangan BUMDes.

||Volume||4||Issue||1||Juni||2023||

p-ISSN: 2302-6375 e-ISSN: 2775-2194

pp. 271-277

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dengan teknik wawancara dan observasi yang dilaksanakan di BUMDes "Sopo Ate" Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes tentang Peran dan Fungsi BUMDes maka dapat disimpulkan bahwa: BUMDes memiliki peran untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian melalui unit usahanya dan secara umum keberadaan BUMDes memang cukup membantu bagi masyarakat terutama petani, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Meski dapat membantu bagi masyarakatn keberadaan BUMDes belum dapat memberikan dampak yang begitu signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes.

Adapun Faktor-faktor yang menjadi penghambat berjalannya BUMDes "Sopo Ate" Desa Kerato seperti Kelembagaan BUMDes yang dapat dikatakan rusak, dikarenakan secara lembaga sendiri BUMDes tidak memiliki struktur organisasi yang lengkap. Hal ini menyebabkan BUMDes tidak dapat berjalan dengan semestinya; Pelayanan yang tidak optimal. Dimana pengelola atau pengurus kurang aktif dalam mengelola dan mengembangkan BUMDes ditambah pengurus yang jarang berada di tempat dan kantor BUMDes yang jarang dibuka, sehingga BUMDes terlihat tidak berjalan; adanya masyarakat yang masih menunggak dalam pengembalian pinjaman, namun keterlambatan ini juga di sebabkan oleh berbagai macam faktor salah satunya pengurus yang tidak berada di tempat; manajemen pengelolaan keuangan yang kurang baik, dilihat dari adanya kasus masyarakat yang meminjam atas nama orang lain; tidak adanya pengambilan agunan atau jaminan sehingga tidak ada kepastian peminjam akan mengembalikan pinjamnnya; sanksi yang tidak konsisten, dimana sanksi baru akan diberikan jika peminjam menunggak membayar selama bertahun-tahun.

Untuk mendorong optimalisasi peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Kerato dapat dilakukan beberapa hal seperti menjalin komunikasi dan kerjasama dengan Pemerintah Desa dan Lembaga-lembaga Desa lainnya untuk mencari solusi dalam mengembangkan BUMDes; melakukan musyawarah bersama Pemerintah Desa dan Lembaga-lembaga yang ada di Desa untuk memusyawarahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh BUMDes agar dapat menemukan solusi terbaik untuk masalah-masalah tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya

Moleong, L.J.(2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Nugroho, R. 2021. Badan

Nugroho, R. (2021). *Badan Usaha Milik Desa Bagian 1 : Konsep Dasar. Edisi Digital*. Jakarta: PT Elex Komputindo

Perda Kabupaten Sumbawa No 24 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa